

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga bentuk upaya dalam penanggulangan kemiskinan tidak dapat disamakan dengan daerah yang lain. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan dapat dijelaskan bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini telah menunjuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Kampar untuk menjadi tim koordinator percepatan pelaksanaan program Zero Kemiskinan melalui surat keputusan Bupati Kampar Nomor 500/Adm-Ek/119 tahun 2013.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) selaku tim koordinator percepatan zero kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. BPPKP selaku tim koordinator percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar kepada setiap kecamatan melalui camat masing-masing. Dalam sosialisasi ini juga menginstruksikan kepada setiap camat untuk mendata masyarakat miskin di tiap-tiap desa dan dilaporkan kembali kepada tim koordinator percepatan penanggulangan kemiskinan BPPKP Kabupaten Kampar.

2. BPPKP memberikan pelatihan terpadu melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang berda di Kecamatan Siak Hulu desa Kubang Jaya kepada masyarakat miskin yang telah didata disetiap kecamatan. Dalam program ini, mereka akan diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing seperti dibidang pertanian, perternakan, perikanan dan wirausaha selama empat belas hari terhitung dari pertama mulainya pelatihan P4S tersebut.
3. Setelah pelatihan P4S ini selesai, para peserta akan diberikan sertifikat kelulusan dan mendapatkan pinjaman modal usaha melalui kemitraan Bank BPR Sarimadu Kabupaten Kampar maksimal seratus juta rupiah sesuai dengan jurusan/keahlian masing-masing.

Dalam pelaksanaan program ini, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi BPPKP dalam mewujudkan program Zero Kemiskinan di Kabupaten Kampar, faktor pendukung dalam program ini yang pertama sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini. Kedua, anggaran biaya dalam kegiatan ini telah di anggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar. Ketiga, lokasi pelatihan yang memadai untuk dilaksanakannya pelatihan-pelatihan berbagai bidang. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah yang pertama, proses pendataan masyarakat miskin yang belum merata. Kedua proses pinjamam modal yakni masih belum meratanya para pesrta yang lulus

pelatihan untuk melakukan pinjaman dana dengan alasan tidak bisa mengembalikan dana yang telah dipinjamnya tersebut.

B. SARAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga dalam penanganannya diperlukan pendekatan-pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kampar adalah melalui pelatihan terpadu yang sesuai dengan keahlian dibidangnya masing-masing. Dari penelitian penulis dilapangan, ada beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan atau masukan untuk BPPKP selaku tim koordinator pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Dalam proses pendataan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kampar hendaknya dapat ditingkatkan lagi sehingga dengan program yang telah ada ini dapat menyentuh seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa-desa dan Kecamatan di Kabupaten Kampar.
2. Melakukan peninjauan kembali untuk mengetahui apakah benar laporan data-data masyarakat miskin yang telah dilakukan camat sehingga mendapatkan kondisi nyata dilapangan, apakah memang benar-benar masyarakat miskin yang mendapatkannya.
3. Meningkatkan kembali pengawasan kepada para peserta pelatihan P4S ini agar mendapatkan ilmu-ilmu yang

bermanfaat dibidangnya masing-masing sehingga program ini berjalan dengan yang diharapkan.

4. Memberikan uang kepada keluarga yang ditinggalkan peserta selama mengikuti pelatihan.
5. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dana.
6. Memberikan laporan-laporan akurat yang sesuai dengan kondisi nyata dilapangan kepada Bupati Kampar untuk dijadikan evaluasi sehingga dapat dicarikan solusi untuk penanggulangannya.